

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asshidiqqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012)
- Ashofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum Cetakan Keempat*, (Jakarta: PT.Rhineka Cipta,2004)
- Asshiddie, Jimly dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2012)
- Atmadja, Arifin P. Soeria, *Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara*, (Jakarta : PT. Gramedia, 1986)
- Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2016)
- Farida, Maria, *Ilmu Perundang-undangan 2 : Proses dan Teknik Pembuatannya*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007)
- Hans Kelsen, 1971. *General Theory of Law and State*, Russel and Russel: New York (Diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media: Bandung,2011.)
- Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: _____, 1994)
- Huda, Nimatul dan R. Nazriyah, *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, (Bandung: Nusa Media, 2011)
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2000)
- Usman, Rachmadi, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, (Penerbit Alumni: Bandung, 2004)
- Saldi Isra dkk, *Perkembangan pengujian perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi (dari Berpikir Hukum Tekstual ke Hukum Progresif)*, (Jakarta: Sekretarian Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi,2010)
- Sulaiman, Alfin *Keuangan Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dalam Perspektif Ilmu Hukum*, (Bandung: PT.Alumni, 2011)

- Sutedi, Adrian, *Hukum Keuangan Negara, Cetakan II* (Jakarta:Sinar Grafika, 2012)
- Supramono, Gatot *BUMN Ditinjau Dari Segi Hukum Perdata*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2016)
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Praktik)*,(Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018)
- Siahaan, Maruar, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta :Konstitusi Press,2005)
- Sembiring, Sentosa, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, (Bandung: CV Nuansa Mulia, 2006)
- Soemitro, Roni Hanitjo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982)
- S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik*, (Bandung: Tarsito, 1968)
- Tjandra ,W. Riawan, *Hukum Keuangan Negara*, (Jakarta : PT. Grasindo, 2006)
- Tim Pusdiklat Pengembangan SDM, *Pengelolaan Keuangan Negara*, (Ujian Dinas Tingkat 1 Kementerian Keuangan, 2018)

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN.

Putusan MK Nomor 77/PUU-IX/2011

Putusan MK Nomor 48/PUU-XI/2013

Putusan MK Nomor 62/PUU-XI/2013

Putusan MA Nomor 21 P/HUM/2017

C. Jurnal dan Artikel Ilmiah

Liany, Febry, “Pengaturan dan Permasalahan Tata Kelola Badan Usaha Milik Negara”, Rechtsvinding Online, Oktober 2015.

Lestari Rani,dkk, “ Konsistensi Pengukuhan Kedudukan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada BUMN Menurut Pelaku Kekuasaan Kehakiman Dalam Kaitannya Dengan Doktrin *Business Judgement Rules*” , Jurnal Hukum Kenotariatan dan Ke –PPAT-an ACTA DIURNAL, Volume 1, No 21, Juni 2018.

Juliani, Henny, “Aspek Yuridis Transformasi Hukum Keuangan Publik Ke Keuangan Privat Terhadap Pengelolaan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada BUMN”,Administrative Law & Governance Journal, Volume 1 Edisi 2, Media 2018.

Nanda Lestari, Sartika,“*Bussines Judgment Rule* sebagai *Immunity Doctrine* bagi Direksi Badan Usaha Milik Negara di Indonesia”, NOTARIUS, Edisi 08, Nomor 2, September 2015.

- Marilang, "Ideologi Welfare State Konstitusi: Hak Menguasai Negara Atas Barang Tambang", Jurnal Konstitusi, Volume 9, No. 2, Juni 2012.
- Paputungan, Merdiansa, "Diskursus Kewenangan Audit BPK Terhadap Keuangan BUMN (Perseroan) Pasca Putusan MK Nomor 62/PUU-XI/2013", Mimbar Hukum, Volume 29, Nomor 3, Oktober 2017.
- Purnomo, Dwi Ary, "Sudut Pandang Hukum tentang Kekayaan BUMN sebagai Kekayaan Negara yang Dipisahkan", Tesis Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2011.
- Satya, Donny, "Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013 Terhadap Independensi Perusahaan Mengenai Pengelolaan Harta Kekayaan BUMN Dalam Mewujudkan *Good Corporate Governance*", Jurnal Skripsi, 2015.
- Susanto, Mei, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai *Negative Budgeter* dalam Pengujian Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara", Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 4, Desember 2017.
- Setiawan, Dolly, "*Kedudukan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Persero Korelasinya Dengan Keuangan Negara Pada Tindak Pidana Korupsi*", Tesis Universitas Islam Indonesia, 2017.

D. Laporan

Laporan Tahunan PT Pertamina Tahun 2017

E. Website

<http://pkbl.bumn.go.id/index/profit/id/3>, diakses pada 10 November 2018

<http://www.bpk.go.id/news/kekayaan-negara-yang-dipisahkan-apakah-tidak-termasukkeuangan-negara>, diakses pada tanggal 20 November 2018

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/> diakses pada 21 November 2018

<https://finance.detik.com/energi/d-3964141/pertamina-rugi-rp-5-t-di-awal-tahun-jual-premium-dan-solar> diakses pada 28 Desember 2018 pukul 18.30 WIB

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181012122650-85-337946/nasib-keuangan-pertamina-tanpa-kenaikan-harga-premium> diakses pada 28 Desember 2018 pukul 18.34 WIB